

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1.Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa Laleten Kecamatan Weliman Kabupaten malaka dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Transparansi. Dalam pelaksanaan pembangunan terdapat penyimpangan yang terjadi pada saat pelaksanaan pembangunanseperti tidak adanya tranparansi dari pemerintah Desa Laleten terkait jumlah anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan program pembangunan sehingga bisa dikatakan penerapan prinsip-prinsip *good governance* belum di terapkan secara baik dan pemerintah desa terkait pertanggungjawaban program pembangunan masih rendah akan tetapi pemerintah desa Laleten Dan BPD selalu semangat dalam melancarkan pelaksanaan pembangunan
2. Akuntabilitas/Pertanggungjawaban. Dalam setiap pembangunan yang di berikan pemerintah desa seperti jalan usaha tani, pengadaan toilet dan sumur bor sudah dijalankan dengan baik. Meskipun hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwa sampai saat ini belum ada laporan pertanggungjawaban dari pemerintah desa mengenai jumlah anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan pembanguaan sehingga sampai saat ini belum bisa diketahui dengan pasti berapa jumlah anggaran yang di gunakan untuk pembangunan yang dilakukan di Desa Laleten.

3. Partisipasi. Dalam setiap pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah bertujuan untuk menjawab semua keluhan serta kebutuhan masyarakat. Akan tetapi dalam pelaksanaan pembangunan pemerintah Desa Laleten tidak melibatkan masyarakat untuk berperan aktif dalam setiap pembangunan masyarakat hanya menjadi penonton dalam setiap pembangunan hal ini karena miskomunikasi atau kurang informasi kepada masyarakat.

## **5.2.Saran**

Dari kesimpulan di atas maka peneliti menyarankan beberapa hal antara lain :

1. Bagi pemerintah Desa Laleten Diharapkan pemerintah Desa Laleten diharapkan lebih lebih transparan mengenai setiap anggaran dana desa yang digunakan untuk setiap pembangunan yang ada di Desa Laleten. Serta aktif memberikan pengertian dan turun ketengah-tengah masyarakat memberi pemahaman dan menjalin komunikasi dengan masyarakat, serta memberikan pengertian kepada masyarakat agar mereka memiliki rasa tanggungjawab terhadap pembangunan dan mengerti akan pentingnya mereka selaku stekholder dalam proses rencana kerja pemerintah desa dan proses pembangunan sehingga tercipta kesejahteraan masyarakat desa.
2. Kepada masyarakat Desa Laleten untuk selalu terlibat dalam setiap pembangunan yang ada di desa bukan saja tanggungjawab pemerintah Desa tetapi semua lapisan masyarakat memiliki tanggungjawab dalam membangun desa, dengan demikian masyarakat diharapkan meningkatkan partisipasi dan keikutsertaan, agar desa lebih berkembang lagi.

3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan bisa melakukan penelitian lebih mendalam dengan menggunakan teori yang berbeda sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan khususnya dalam penerapan prinsip-prinsip good governance dalam tata kelola pemerintahan di Desa Laleten, Kecamatan Weliman Kabupaten Malaka.

## DAFTAR PUSTAKA

- Cholid Nurbuko; 2003; *Metode Penelitian*. Pt. Bumi Putra Aksara Airlanga. Jakarta.
- Ganie Rochman; 2000; *Analisis Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Rangka Pelayanan Publik Di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu*. Kota Samarinda.
- Kartasasmita; 1996; *Pemberdayaan Masyarakat: Konsep Pembangunan Yang Berakar Pada Masyarakat*. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Jakarta.
- Listyaningsih; 2014; *Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Loina L. Krina; 2003; *Indikator Dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi*. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Jakarta.
- Moleong J. Lexy; 2000; *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Pt. Remaja Rosdakaya. Bandung.
- Mardiasmo ; 2004; *Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah*. Pt. Perdana Media. Yogyakarta
- Nuryanto A. Daim; 2014; *Hukum Administrasi Perbandingann Penyelesaian Maladministrasi Oleh Ombudsman Dan Pengadilan Tata Usaha Negara*. Surabaya.
- Rosyada Dede; 2005; *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education): Demokrasi Hak Asasi Manusia Dan Masyarakat Madani*. Predana Media. Jakarta.
- Sinambella; 2011; *Asas-Asas Pelyanan Publik*. Alfabeta. Bandung.
- Sedarmayanti; 2003; *Good Governance (Pemerintahan Yang Baik) Dalam Rangka Otomi Daerah*. Mandar Maju. Jakarta.
- Sudarmayanti; 2004; *Sumber Daya Manusia Dan Produktifitas Kerja*. Mandar Maju. Bandung.
- Sumaryadi I. Nyoman; 2010; *sosialogi pemerintahan*. Pt Ghalia Indonesia, Bogor.
- Sarundajang; 2002; *Keberadaan Pemerintah Desa Dalam Bermasyarakat*. Pustaka

- Sinar Harapan. Bandah Aceh.
- Sumarto ; 2009; *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance*. Yayasan Obor. Jakarta.
- Sunyoto; 2013; *Metodologi Penelitian Akuntansi*. Pt. Refika Aditama Anggota Ikapi. Bandung.
- Sugiyono; 2002; *Metodologi Penelitian Kuantitatif & Kualitatif Dan R&D* Alfabeta, Bandung.

**Sumber Lain:**

- Undang-Undang No.28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme.
- Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Tentang Prinsip Transparansi Dan Keterbukaan Informasi Publik .
- Profil Desa Laleten Kecamatan Weliman Kabupaten Malaka 2023.
- Subbag Hukum Bpk 2015, *Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Mendirikan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Perwakilan Provinsi Ntt*. ([http://Kupang.Bpk.Go.Id/Wp-Conten/Uploads/2015/02/Kewenangan Pemerintah-Desa-Dalam-Mandirikan.Pdf](http://Kupang.Bpk.Go.Id/Wp-Conten/Uploads/2015/02/Kewenangan-Pemerintah-Desa-Dalam-Mandirikan.Pdf). Diakses Pada Tanggal 13 Januari 2023).
- Heriyanto Anas 2015. "*Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa Triharjo Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman*" University Yogyakarta (<http://respository.upy.ac.id>. Diakses Pada Tanggal 29 November 2022).
- Fransisca Maria 2017. "*Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Perencanaan, Pelaksanaan, Dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa. Studi Desa Wijirejo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul*" Universitas Sanata Dharman, Yogyakarta. (<https://respository.usd.ac.id>. Diakses Pada Tanggal 29 November 2022).
- A Muh Ikshan W.R 2020. "*Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelaksanaan Pemerintah Desa, Studi Desa Pesse Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng*" Universitas Hasanuddin.

- Makassar (<https://core.ac.uk>. Diakses Pada Tanggal 07 Desember 2022).Fidyah Nita Ramadani 2018. "*Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Paten*" Universitas Negeri Makassar (<https://eprints.unm.ac.id>. Diakses Pada Tanggal 07 Desember 2022).
- Made Artana 2021. "*Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Meningkatkan Kepuasan Pelayanan Publik Pada Kantor UPT Dinas Pendapatan Provinsi Bali Di Kabupaten Bandung*" Universitas Warmadewa Denpasar (<http://digulip.uinkhas.ac.id>. Diakses Pada Tanggal 07 Desember 2022).
- Astomo Putra. "Penerapan Prinsip-Prinsip Pemerintah Yang Baik Dalam Penyelenggaraan Pemerintah" *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 16.3 (2014):401-402.
- Dewi, Elvia Puspa. "*Good Governance Dan Transparan Rencana Srategi Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.*" *Jurnal Lentera Bisnis* 7.2 (2018): 81-108.
- Yanto, Edi, Andaqfir Aqfir. "Pengaruh Transparansi, Partisipasi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa." *Economy Deposit Journal*. 2.2 (2020).
- Muis, Muhamad Amirul Haq, Hasrat Arief Saleh, And Muhamad Rusli. "*Analisis Implementasi Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Kecamatan Panakukkang Kota Makasar.*" *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan* (2014):73-82.
- Prianto, Andi Luhur. "*Good governance dan formasi kebijakan publik neo-liberal.*" *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 1.1 (2011).
- Powae dan Saerang. "Pengaruh Akuntabilitas Dan Akuntabilitas Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud." *Jurnal Accountability*.(2013) Vol.2. No,1, Hal 29-34.